



2023

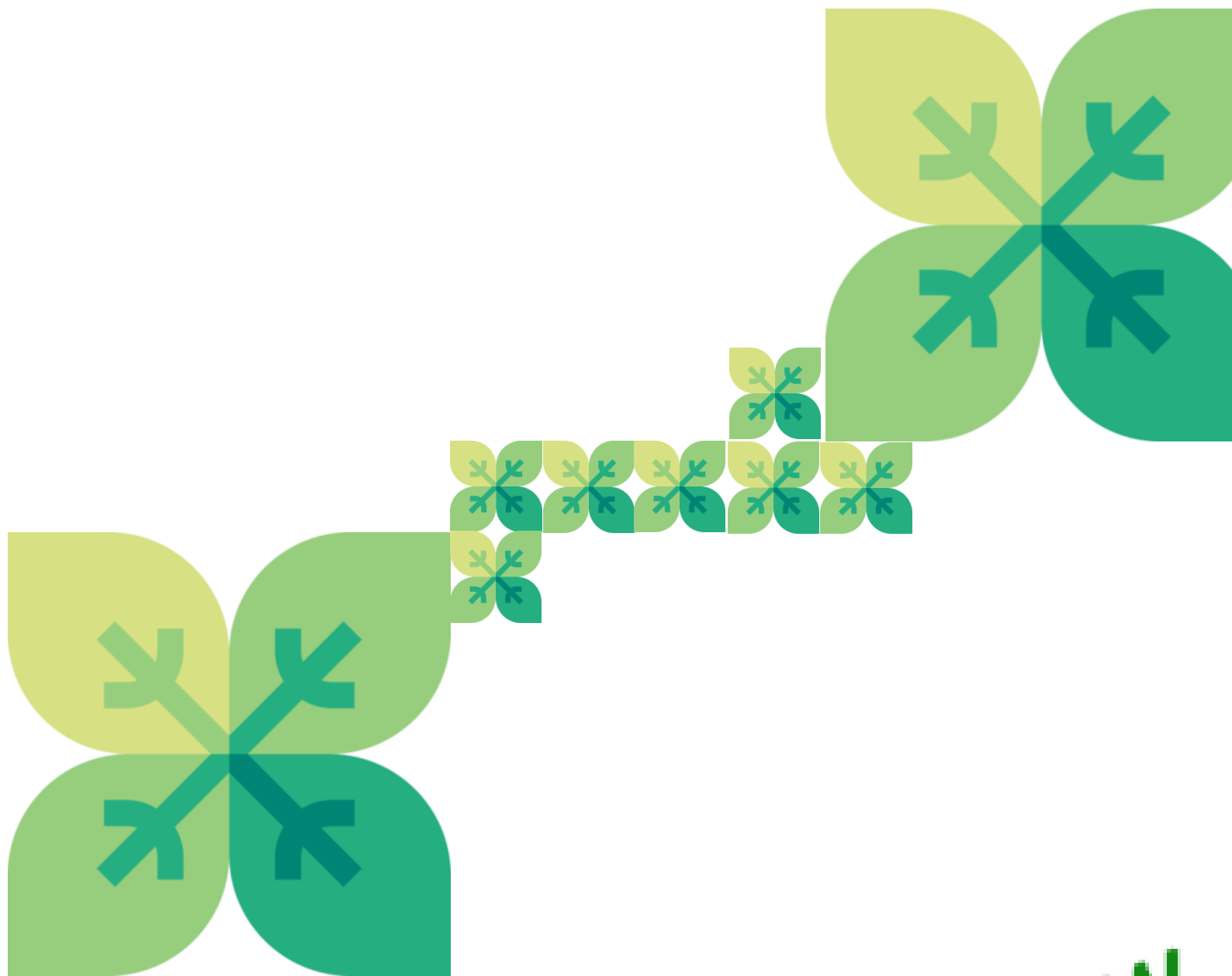
LAPORAN KINERJA

BPSI LINGKUNGAN PERTANIAN



**PERTANIAN CEMERLANG,
INDONESIA GEMILANG**





**STANDARD
SERVICES GLOBALIZATION**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja TA. 2023 Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian (BPSI Lingkungan Pertanian) dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian, sebagai unit kerja eselon III Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai mandat untuk melaksanakan Perumusan Rancangan Standar dan Pengujian Instrumen Lingkungan Pertanian.

Pencapaian keberhasilan yang diperoleh oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian merupakan hasil dari penguatan sumber daya, organisasi, dan perbaikan proses bisnis internal Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian secara konsisten, yang merupakan kontribusi seluruh jajaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian untuk berupaya mendorong tercapainya IKU yang telah ditetapkan. Hal tersebut merupakan sebagai bentuk dari pengimplementasian *core values* Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BERAKHLAK). Selain itu, perbaikan secara terus menerus perlu ditanamkan pada seluruh jajaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Apresiasi seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dengan Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian baik seluruh Kementerian/ Lembaga, Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Pertanian, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Swasta maupun seluruh masyarakat yang kerap bersentuhan dengan Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian. Diharapkan agar ke depannya kerja sama ini dapat dilanjutkan dengan baik dan Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian dengan pelayanan yang lebih baik. Kontribusi semua pihak tentu bermanfaat untuk membangun Pertanian Indonesia yang Maju, Mandiri dan Modern.

Laporan Kinerja TA 2023 yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian dan umpan balik bagi instansi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja. Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami berharap adanya masukan, saran, dan umpan balik dari para pembaca yang bersifat membangun untuk kemajuan BPSI lingkungan Pertanian di masa yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pati, 31 Desember 2023

Kepala Balai,



Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP., M.Sc

NIP. 19770107 200212 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian, Balai Pengujian Standar Lingkungan Pertanian (BPSI Lingkungan Pertanian) menyusun rencana operasional program periode 2023-2025 untuk perencanaan program utama kegiatan pengelolaan standar yang mendukung sasaran/prioritas program Kementerian Pertanian jangka pendek berupa Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta Program Dukungan Manajemen.

Balai Pengujian Standar Lingkungan Pertanian telah menetapkan sasaran utama/target kinerja yang ingin dicapai sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian dengan indikator kinerja utama jumlah rancangan standar lingkungan pertanian yang dihasilkan pada tahun berjalan dan target capaian kinerja 1 RSNI.
- 2) Terwujudnya Birokrasi Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian yang Efektif dan Efisien dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator kinerja nilai pembangunan zona integritas (ZI) dan target capaian kinerja nilai ZI sebesar 80
- 3) Terkelolanya anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja nilai kinerja anggaran berdasarkan nilai SMART DJA dan target capaian kinerja nilai SMART sebesar 87.

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan selama TA 2023 adalah: alokasi anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan standar maupun program dukungan manajemen karena adanya refokusing anggaran, terkendalanya kegiatan kerjasama akibat perubahan prosedur, dan terkendalanya kegiatan layanan pengujian akibat anggaran yang bersumber dari pengembalian negara bukan pajak (PNBP) yang tidak dapat ditarik akibat adanya perubahan terkait regulasi serta faktor SDM berupa terbatasnya jumlah SDM berkeahlian khusus. Keterbatasan alokasi anggaran disikapi dengan optimalisasi kegiatan dengan menggunakan skala prioritas pada kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Keterbatasan jumlah SDM berkeahlian khusus terkait dengan pengembangan sistem informasi didekati dengan memaksimalkan SDM yang ada dan dengan

mengoptimalkan potensi dari SDM yang ada dan memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya bagi SDM potensial untuk mengembangkan kariernya.

Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK) sampai akhir bulan Desember 2023, seluruh indikator kinerja sasaran yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2023 telah berhasil diselesaikan dengan baik dengan capaian kinerja melebihi 100%. Untuk membiayai pencapaian sasaran kinerja tersebut, pada tahun anggaran 2023 BPSI Lingkungan Pertanian mendapatkan anggaran berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) revisi terakhir mendapat anggaran sebesar Rp 8.087.116.000,- (Delapan milyar delapan puluh tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dengan target capaian output sebagaimana yang tercantum dalam dokumen PK yang ditandatangani oleh Kepala Balai.

Sampai akhir Desember 2023, total realisasi anggaran yang berhasil diserap BPSI Lingkungan Pertanian sebesar Rp. 7.636.084,014,- atau 94,42%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 451.031.986,- atau 5,58% yang bersumber dari anggaran PNBPN. Dengan serapan anggaran kurang dari 100% seluruh kegiatan dapat terselesaikan dengan capaian fisik melebihi 100%. Pencapaian target sasaran yang berhasil direalisasikan oleh BPSI Lingkungan Pertanian hingga akhir Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) dokumen RSNI tentang metode pengukuran emisi gas rumah kaca (GRK) dari lahan padi sawah, dan 3 (tiga) dokumen usulan PNPS (Program Nasional Perumusan standar),
- 2) Nilai pembangunan zona integritas (ZI) sebesar 83,10; dan
- 3) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) berdasarkan aplikasi SMART DJA sebesar 89,19

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2023 antara lain ditentukan oleh kondisi kerjasama yang baik antara pihak manajemen dengan pelaksana kegiatan teknis, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, kinerja BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2023 telah berhasil dicapai dengan rata-rata persentase ketercapaian sebesar 101,69% menunjukkan keberhasilan dengan kategori sangat berhasil.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur, Tugas, dan Fungsi Organisasi	2
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.2 Struktur Organisasi.....	3
1.3. Sumber Daya Manusia	5
1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	6
1.5. Dukungan Anggaran.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. Perencanaan Strategis	8
2.2. Program dan Kegiatan	10
2.3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	10
2.4. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	12
3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.....	14
3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	23
3.1.3. Capaian Kinerja Lainnya.....	26
PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran PNS dan P3K Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian berdasarkan tingkat golongan dan pendidikan.....	5
Tabel 2. Sebaran tenaga fungsional di Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Tahun 2023	6
Tabel 3. Daftar jenis, jumlah dan luas bangunan Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Tahun 2023.....	6
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Tahun 2023.....	11
Tabel 5. Capaian Kinerja PSI Perkebunan TA 2023.....	13
Tabel 6. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK1 tahun 2023	14
Tabel 7. Hasil penilaian pembangunan ZI Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian tahun 2023	20
Tabel 8. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK 2 tahun 2023	21
Tabel 9. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK3 TA 2023	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kedudukan Balai Pengujian Standar dan Instrumen Lingkungan Pertanian dalam Struktur Organisasi BSIP	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Tahun 2023.....	4
Gambar 3. Suasana rapat teknis-1 pembahasan draft RSNI Metode Pengambilan Contoh GRK dari Lahan Sawah.....	16
Gambar 4. Suasana rapat teknis-2 sekaligus rapat konsensus pembahasan draft RSNI Metode Pengambilan Contoh GRK dari Lahan Sawah.....	16
Gambar 5. SNI 9224-1:2023.....	17
Gambar 6. Tangkapan layar rancangan standar lingkungan pertanian yang diajukan sebagai usulan PNPS TA. 2023.....	18
Gambar 7. Hubungan komponen dan indikator pembangun komponen	19
Gambar 8. Nilai SMART Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian TA 2023	22
Gambar 9. Perbandingan capaian kinerja Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM 2020-2023.....	24
Gambar 10. Perbandingan capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran 2020-2023	24
Gambar 11. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022.....	25
Gambar 12. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021.....	26
Gambar 13. Status Akreditasi SNI ISO 17025:2017.....	27
Gambar 14. Sertifikat Akreditasi SNI ISO 9001:2015.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menyatakan bahwa sarana prasarana pertanian mulai dari benih, bibit, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian harus memenuhi standar mutu dan disertifikasi. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Pertanian melaksanakan reorganisasi dengan membentuk Unit Kerja Eselon 1 yang memiliki tugas standardisasi instrumen pertanian dan disahkan melalui Peraturan Presiden 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Peraturan Presiden tersebut diikuti dengan terbitnya Permentan 19 tahun 2022 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pusat dan Balai Besar lingkup Kementerian Pertanian dan Permentan 13 tahun 2023 yang mengatur SOTK UPT (Balai) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

Sesuai Perpres Nomor 117 Tahun 2022, tugas BSIP adalah menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian. Adapun fungsi dari BSIP yaitu sbb:

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian.
2. Pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrument di bidang pertanian.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrument di bidang pertanian.
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

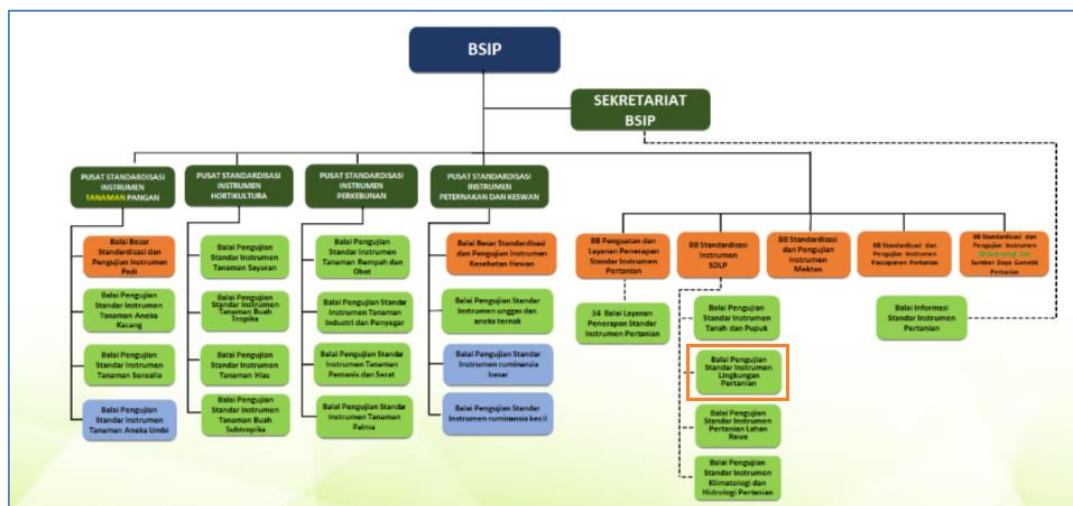
Balai Pengujian Standar dan Instrumen Lingkungan Pertanian (BPSI Lingkungan Pertanian) sebagai salah satu UPT lingkup BSIP, mengacu pada Permentan Nomor 13 tahun 2023 pasal 138 memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian.

Laporan Kinerja Balai Pengujian Standar dan Instrumen Lingkungan Pertanian tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2023 sebagaimana target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara kepala Balai Pengujian Standar dan Instrumen Lingkungan Pertanian dengan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Dalam mencapai target kinerja tersebut, didukung juga dengan beberapa kegiatan meliputi

manajemen kelembagaan, ketatausahaan dan sumberdaya pendukung, program kerja dan monitoring evaluasi, dan Sistem Pengendalian Internal (monev-SPI), serta kegiatan penyebarluasan hasil standar dan kegiatan kerjasama. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian tahun 2023 serta anggaran dari kegiatan kerjasama. Laporan ini disusun secara ringkas, tetapi tidak mengurangi maksud dan tujuan dari masing-masing kegiatan. Laporan rinci dari setiap kegiatan disajikan dalam laporan secara terpisah, yang tertuang dalam laporan akhir masing-masing kegiatan.

1.2. Struktur, Tugas, dan Fungsi Organisasi

Mengacu pada Permentan Nomor 13 tahun 2023 pasal 138 ayat 2 Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian (BPSI Lingkungan Pertanian) dalam pelaksanaan tugas pengujian standar instrumen lingkungan pertanian BPSI Lingkungan Pertanian dikoordinasikan oleh Unit Kerja (UK) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP).



Gambar 1. Kedudukan Balai Pengujian Standar dan Instrumen Lingkungan Pertanian dalam Struktur Organisasi BSIP

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Permentan Nomor 13 tahun 2023, Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian yang selanjutnya disebut BPSI Lingkungan Pertanian adalah UPT BSIP yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian. Dalam pelaksanaan tugas pengujian standar instrumen lingkungan pertanian BPSI Lingkungan Pertanian dikoordinasikan oleh Unit Kerja (UK) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP). Adapun mengacu pada Permentan Nomor 13

tahun 2023 pasal 139, Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian menyelenggarakan fungsi sbb:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen lingkungan pertanian;
2. Pelaksanaan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian;
3. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi lingkungan pertanian;
4. Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan pertanian;
5. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen lingkungan pertanian;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

1.2.2 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tupoksinya Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Balai (eselon IIIA) yang dibantu oleh 1 (satu) pejabat struktural (eselon IVA), yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, dan rumah tangga.

Selain itu terdapat 2 (dua) subkoordinator yang membawahi subkelompok substansi lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian yang diatur dalam Kepmentan Nomor 2883/KPTS/KP.230/A/08/2022 tentang koordinator substansi dan subkoordinator substansi lingkup unit pelaksana teknis kementerian pertanian terdiri atas:

1. Subkoordinator Pelayanan Jasa; dan
2. Subkoordinator Pelayanan teknis

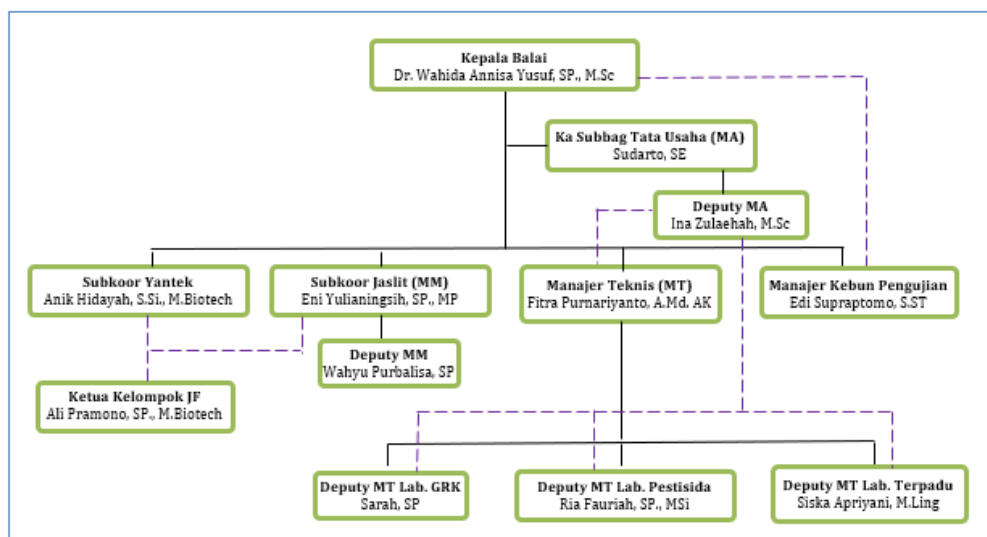
Adapun uraian tugas masing-masing subkoordinator mengacu pada Permentan Nomor 9 tahun 2021 yaitu sbb:

1. Subkelompok Jasa Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian lingkungan pertanian.
2. Subkelompok Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana kegiatan teknis lingkungan pertanian.

Selain Kasubbag Tata Usaha dan subkoordinator, juga terdapat beberapa bagian yang diberikan tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan Laboratorium Pengujian dan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian yaitu sebagai berikut:

1. Manajer Administrasi (MA) Laboratorium yang dirangkap oleh Kasubbag Tata Usaha,
2. Manajer Mutu (MM) Laboratorium yang dirangkap oleh Subkoordinator Pelayanan Jasa,
3. Manajer Teknis (MT) laboratorium yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian laboratorium,
4. Deputi MT Laboratorium Gas Rumah Kaca yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian emisi gas rumah kaca,
5. Deputi MT Laboratorium Terpadu yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian kesuburan tanah dan analisa cemaran logam berat,
6. Deputi MT Laboratorium Pestisida yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian residu pestisida,
7. Manajer Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang bertanggung jawab pada pengelolaan dan operasional kebun pengujian

Selain itu juga terdapat Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan beberapa kepala urusan-urusan untuk memudahkan menjalankan manajemen balai. Sebagai wujud manajemen satu pintu dan memudahkan kontrol, struktur Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian melekat dengan struktur Laboratorium Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen balai.



Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Tahun 2023

1.3. Sumber Daya Manusia

Pada Desember 2023 jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian sebanyak 51 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan pendidikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1. Jumlah PNS berpendidikan S3 berjumlah 2 orang, S2 berjumlah 14 orang, S1 berjumlah 11 orang, D4 berjumlah 3 orang, D3 berjumlah 5 orang, SLTA berjumlah 14 orang, dan SD berjumlah 2 orang. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga SDM perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang ilmu yang dibutuhkan.

Tabel 1. Sebaran PNS dan P3K Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian berdasarkan tingkat golongan dan pendidikan

USIA	Tingkat Pendidikan								Jumlah
	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	
≤20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	-	-	-	-	1	-	-	-	1
26-30	-	3	-	-	2	1	-	-	6
31-35	-	3	5	-	-	-	-	-	8
36-40	-	5	1	-	2	1	-	-	9
41-45	1	1	4	3	-	3	-	-	12
46-50	1	2	1	-	-	5	-	-	9
51-55	-	-	-	-	-	4	-	2	6
56-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	2	14	11	3	5	14	0	2	51

Tahun 2023 Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian memiliki 2 orang tenaga fungsional ASTA, 7 orang tenaga fungsional PMHP, 1 orang tenaga fungsional POPT, dan 15 orang tenaga fungsional teknisi litkayasa. Peningkatan jenjang fungsional terus dilakukan melalui penilaian hasil karya tenaga peneliti dan litkayasa secara berkala. Sebaran tenaga fungsional Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran tenaga fungsional di Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Tahun 2023

No.	Jabatan Fungsional		No.	Jabatan Fungsional	
	Fungsional Ahli	Jumlah		Fungsional Terampil	Jumlah
1.	ANJAK Ahli Madya	-	1.	Teknisi Litkayasa Penyelia	3
2.	ASTA Ahli Muda	4	2.	Teknisi Litkayasa Mahir	8
3.	PMHP Ahli Muda	1	3.	Teknisi Litkayasa Terampil	4
4.	PMHP Ahli Pertama	6	4.	Teknisi Litkayasa Pemula	-
5.	POPT Ahli Pertama	1	5.	Teknisi Litkayasa Non Klas	-
Jumlah Tenaga Fungsional Ahli		13	Jumlah Tenaga Fungsional Litkayasa		15

1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian didukung oleh sarana dan prasarana utama meliputi laboratorium, smart greenhouse, rumah kaca, Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP), dan lain-lain. Laboratorium dimanfaatkan untuk mendukung tuis pengujian dan pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar. Daftar sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Daftar jenis, jumlah dan luas bangunan Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Tahun 2023

No.	Jenis Bangunan	Jumlah Unit	Luas (m ²)
1	Gedung Kantor Utama	1	514
2	Gedung Kantor Peneliti	1	684
3	Gedung Kantor Laboratorium GRK	2	263
4	Gedung Kantor Laboratorium Terpadu	1	200
5	Mess Tamu	1	562
6	Gedung Pertemuan Kebun Percobaan	1	162
7	Rumah Dinas	9	489
8	Smart Greenhouse	1	72
9	Rumah Kasa	3	252
10	Mess Karyawan	1	180
11	Ruang Makan	1	200

No.	Jenis Bangunan	Jumlah Unit	Luas (m²)
12	Pos Satpam	5	82
13	Garasi	3	190
14	Lantai Jemur	1	512
15	Kandang Sapi	1	64
16	Bangunan Lainnya (Selasar + <i>Landscaping</i> + Gudang)	4	649
17	Gedung Arsip	1	63
18	Gazebo	3	57
19	Pagar Lingkungan	4	1.764
20	Rumah Tamu	3	108

1.5. Dukungan Anggaran

Pada tahun 2023, Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian memperoleh anggaran untuk melaksanakan program nilai tambah dan daya saing pertanian, serta program dukungan manajemen sebesar Rp. 8.087.116.000,-.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian 2023-2025 mengacu pada Renstra BSIP Kementerian Pertanian yang disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis global maupun nasional, terutama dalam aspek lingkungan pertanian. Penyusunan Renstra Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian mengacu kepada: 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2) Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025, 3) Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, dan 4) Renstra Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2020-2024. Secara operasional, Renstra ini yang dalam penjabarannya disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis pembangunan nasional dan respon stakeholders.

2.1.1. Visi

Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian memiliki visi menjadi Lembaga pengujian standar instrumen lingkungan pertanian bertaraf nasional dan internasional, mendukung pembangunan pertanian maju, mandiri, modern. Ciri-ciri bertaraf nasional dan internasional antara lain: SDM, prasarana dan sarana serta proses penyusunan rancangan standar instrumen lingkungan pertanian mengacu kepada standar nasional dan internasional; sebagian besar prasarana dan sarannya sudah terakreditasi; semua SDM tersertifikasi.

2.1.2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan pertanian dan visi dari Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian, maka misi Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian, adalah:

1. Melaksanakan penyusunan dan pengujian rancangan standar instrumen lingkungan pertanian yang meliputi emisi dan absorpsi gas rumah kaca, serta cemaran bahan agrokimia (residu pestisida dan logam berat) di lahan pertanian.
2. Mendiseminasikan/menyebarluaskan standar instrumen lingkungan pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.

3. Mengembangkan jejaring kerjasama nasional dan internasional dalam rangka harmonisasi dan pemanfaatan standar instrumen lingkungan pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian.

2.1.3. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian pada tahun 2023 yaitu:

1. Menghasilkan produk instrumen pertanian terstandar;
2. Menghasilkan standar instrumen pertanian yang dapat mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing;
3. Mewujudkan birokrasi pusat standardisasi instrumen perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
4. Mewujudkan anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

2.1.4. Sasaran

Mengacu pada visi, misi serta arah dan kebijakan strategis tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tersusunnya rancangan standar instrumen lingkungan pertanian yang meliputi emisi dan absorpsi gas rumah kaca, serta cemaran bahan agrokimia (residu pestisida dan logam berat) di lahan pertanian.
2. Terdiseminasi standarnya standar instrumen lingkungan pertanian, yang meliputi emisi dan absorpsi gas rumah kaca, serta cemaran bahan agrokimia (residu pestisida dan logam berat) di lahan pertanian.
3. Terjalinnnya kerjasama dan kemitraan di bidang standar instrumen lingkungan pertanian dengan lembaga nasional dan internasional.
4. Meningkatnya kapabilitas dan profesionalisme sumberdaya Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian mendukung kualitas dan akuntabilitas layanan publik.

2.2. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian tahun 2023 mengacu pada program BSIP diantaranya berupa program teknis yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian, serta Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan pada masing-masing program teknis adalah (1) Pelaksanaan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian dan (2) Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi lingkungan pertanian. Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan output yaitu (1) Rancangan Standar Instrumen Lingkungan Pertanian, (2) Konsep Rancangan Standar Instrumen Lingkungan Pertanian. Kegiatan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi lingkungan pertanian dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan satu rincian output produk instrumen lingkungan pertanian terstandar.

Program Dukungan Manajemen dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan rincian output yaitu (1) Layanan BMN, (2) Layanan Hubungan Masyarakat, (3) Layanan Umum, (4) Layanan Perkantoran, (5) Layanan Sarana dan Prasarana Internal, (6) Layanan Manajemen Kinerja Internal, (7) Layanan Perencanaan dan Penganggaran, (8) Layanan Monitoring dan Evaluasi, dan (9) Layanan Manajemen Keuangan.

2.3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Pada tahun 2023, Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian mempunyai dua sasaran kegiatan yaitu (1) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian dan (2) Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel. Untuk mengukur capaian dua sasaran kegiatan Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian, terdapat tiga Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu:

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, diukur dengan satu IKSK yaitu jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan.
2. Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya birokrasi kementerian pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel, diukur dengan dua IKSK yaitu Nilai Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian dan Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian.

2.4. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada output dan outcome untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 yang mengatur SOTK UPT (Balai) lingkup BSIP.

Berdasarkan dinamika yang terjadi karena adanya transformasi lembaga dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) ke Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), pelaksanaan kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian yang tertuang dalam bentuk PK telah mengalami beberapa kali revisi sesuai dengan kebijakan dan revisi anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian. Perjanjian Kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2023 yang terdiri dari 2 Sasaran Kinerja dan 3 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dengan pagu DIPA sebesar Rp 8.087.116.000,-.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan	1 Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel	Nilai Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	81 (Nilai ZI)
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	87 (Nilai SMART)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja tahun 2023 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja tahun anggaran 2023 sekaligus pelaksanaan tahun pertama Renstra Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian periode 2023-2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi setiap indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Hasil pengukuran kinerja memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.

Keberhasilan pencapaian seluruh IKSK Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian diukur melalui maximize target sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Pengukuran maximize target jika hasilnya dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. Maximize target dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja ditetapkan berdasarkan empat kategori keberhasilan, yaitu:

- 1) Sangat berhasil jika capaian >100%
- 2) Berhasil jika capaian 80-100%
- 3) Cukup berhasil jika capaian 60-79%
- 4) Tidak berhasil jika capaian 0-59%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1. IKSK1: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan

Σ Jumlah Rancangan Standar Instrumen Lingkungan Pertanian yang Dihasilkan pada tahun berjalan

2. IKSK2: Nilai Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

Penilaian dilakukan melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi dalam rangka penetapan Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM, baik secara mandiri lingkup BSIP maupun oleh Tim Inspektorat Investigasi, Itjen Kementan.

3. IKSK3: Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

Nilai kinerja anggaran dihitung secara otomatis dalam aplikasi SMART dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target dari tiga IKSK Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian, seluruhnya telah tercapai dengan rata-rata persentase ketercapaian 101,69% menunjukkan keberhasilan dengan kategori **sangat berhasil**. Capaian IKSK1 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan pada tahun berjalan yang dihasilkan adalah sebanyak 1 Standar dari target 1 Standar atau tercapai 100,00% dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK2 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian adalah sebesar 83,10 dari target 81,00 atau tercapai 102,59% dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK3 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan adalah 89,16 dari target 87,00 atau tercapai 102,48% dengan kategori sangat berhasil. Rincian capaian kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 5. Capaian Kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian TA 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	%	Keberhasilan
1.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1	Standar	1	100,00	Sangat berhasil
2.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	Nilai Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	81	Nilai	83.10	102,59	Sangat berhasil
3.	Terwujudnya birokrasi Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	87	Nilai	89.16	102,48	Sangat berhasil
	Rata-rata Capaian					101,69	Sangat Berhasil

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

a. IKSK1 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, pemerintah, atau keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sebagai lembaga yang melaksanakan tugas di bidang standardisasi di lingkup Kementerian Pertanian, salah satu tugas yang dilaksanakan oleh BSIP adalah merumuskan standar di bidang pertanian. Standar yang disusun berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Persyaratan Teknis Minimal (PTM). SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PTM adalah Standar Mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri.

Dalam rangka mendukung tugas BSIP sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang standardisasi di lingkup Kementerian Pertanian, pada tahun 2023 BPSI Lingkungan memiliki sasaran kinerja diantaranya menghasilkan rancangan standar instrumen lingkungan pertanian dengan target capaian kinerja 1 (satu) RSNI. Hingga Desember tahun 2023, BPSI Lingkungan Pertanian telah menghasilkan 1 (satu) RSNI tentang metode pengukuran emisi gas rumah kaca (grk) dari lahan padi sawah yang dirumuskan melalui komite teknis (komtek) 13-15 Perubahan Iklim. Pada tahun 2023, BPSI Lingkungan Pertanian juga menghasilkan 3 (tiga) dokumen rancangan standar yang diajukan ke Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Program Nasional Perumusan standar (PNPS). Perbandingan antara target dan realisasi IKSK1 tahun 2023 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK1 tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	1 SNI	1	100	Berhasil

RSNI Metode pengukuran emisi gas rumah kaca (GRK)

Konsep RSNI (RSNI1) Metode pengukuran emisi GRK disusun oleh tim konseptor yang terdiri dari pejabat fungsional dan tim laboratorium pengujian emisi GRK di lingkup BSIP Lingkungan Pertanian. Adapun tujuan dari perumusan RSNI adalah Menyusun standar pengukuran emisi gas rumah kaca dari lahan padi sawah agar para konsumen dapat mengadopsi suatu prosedur pengambilan contoh grk dari lahan pada sawah sesuai standar dan memudahkan pemangku kepentingan dalam penerapan. Standar ini menetapkan metode pengambilan, penyimpanan, dan analisis contoh gas CH₄ dan gas N₂O dari lahan padi sawah dengan menggunakan sungkup tertutup.

RSNI ini diusulkan sebagai Usulan PNPS rancangan standar metode pengambilan contoh dan pengukuran GRK pada lahan pertanian melalui mekanisme usulan PNPS Mendesak melalui BSIP pada bulan Agustus 2023 dan disetujui oleh BSN pada bulan Agustus 2023 serta ditunjuk komtek 13-15 Perubahan Iklim (PI), sebagai komite teknis untuk perumusan rancangan SNI tersebut

Perumusan RSNI tentang metode pengukuran emisi GRK ini dilakukan dengan (2) dua kali rapat teknis, yaitu pada tanggal 11 September 2023 dan 26 Oktober 2023. Ratek1 dilaksanakan di Hotel Lor In Sentul, Kab. Bogor Jawa Barat dengan hasil RSNI1, draft rancangan standar dipecah menjadi beberapa bagian untuk menyederhanakan dan memfokuskan pembahasan rancangan standar menjadi: RSNI Metode pengukuran emisi gas metana (CH₄) dan dinitrogen oksida (N₂O) di lahan padi sawah – Bagian 1: metode pengambilan contoh gas metana CH₄ dan dinitrogen oksida (N₂O). Ratek 2 dilaksanakan di auditorium Dr. Haryono, BPSI Lingtan di Pati, Jawa Tengah dengan hasil disetujuinya rancangan SNI Metode pengukuran emisi gas metana (CH₄) dan dinitrogen oksida (N₂O) di lahan padi sawah – Bagian 1: metode pengambilan contoh gas CH₄ dan dinitrogen oksida (N₂O) untuk diajukan ke BSN dengan catatan perbaikan template oleh sekretariat komtek.

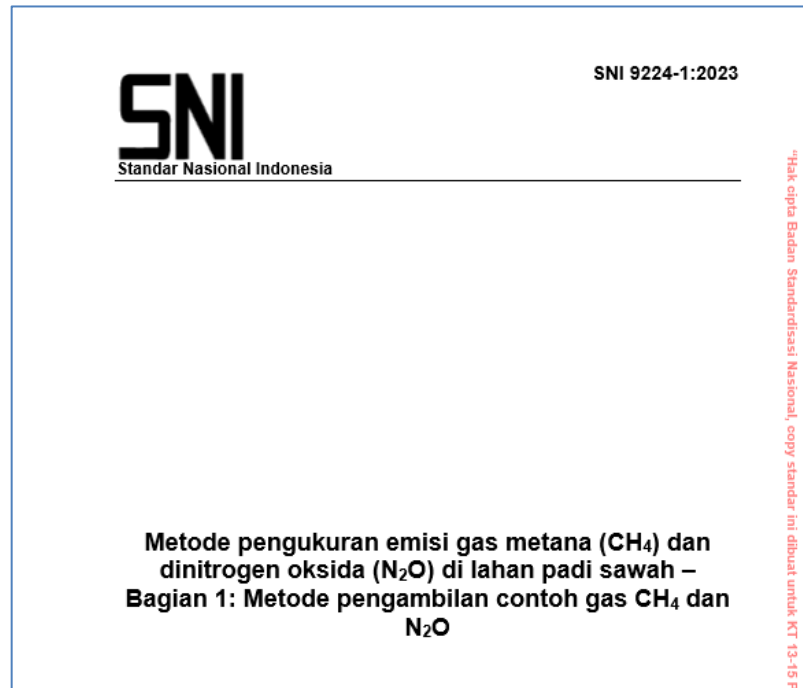
Setelah disetujuinya RSNI tersebut melalui rapat konsensus maka diajukan ke BSN untuk dilakukan Jajak pendapat terkait RSNI4 9224-1:202Y: Metode pengukuran emisi gas metana (CH₄) dan dinitrogen oksida (N₂O) di lahan padi sawah – Bagian 1: metode pengambilan contoh gas CH₄ dan dinitrogen oksida (N₂O) dari tanggal 13 sd 27 November 2023 dan pada tanggal 28 melalui keputusan kepala BSN Nomor 637/KEP/BSN/12/2023 terbit SNI 9224-1:2023 : Metode pengukuran emisi gas metana (CH₄) dan dinitrogen oksida (N₂O) di lahan padi sawah – Bagian 1: metode pengambilan contoh gas CH₄ dan dinitrogen oksida (N₂O).



Gambar 3. Suasana rapat teknis-1 pembahasan draft RSNI Metode Pengambilan Contoh GRK dari Lahan Sawah



Gambar 4. Suasana rapat teknis-2 sekaligus rapat konsensus pembahasan draft RSNI Metode Pengambilan Contoh GRK dari Lahan Sawah

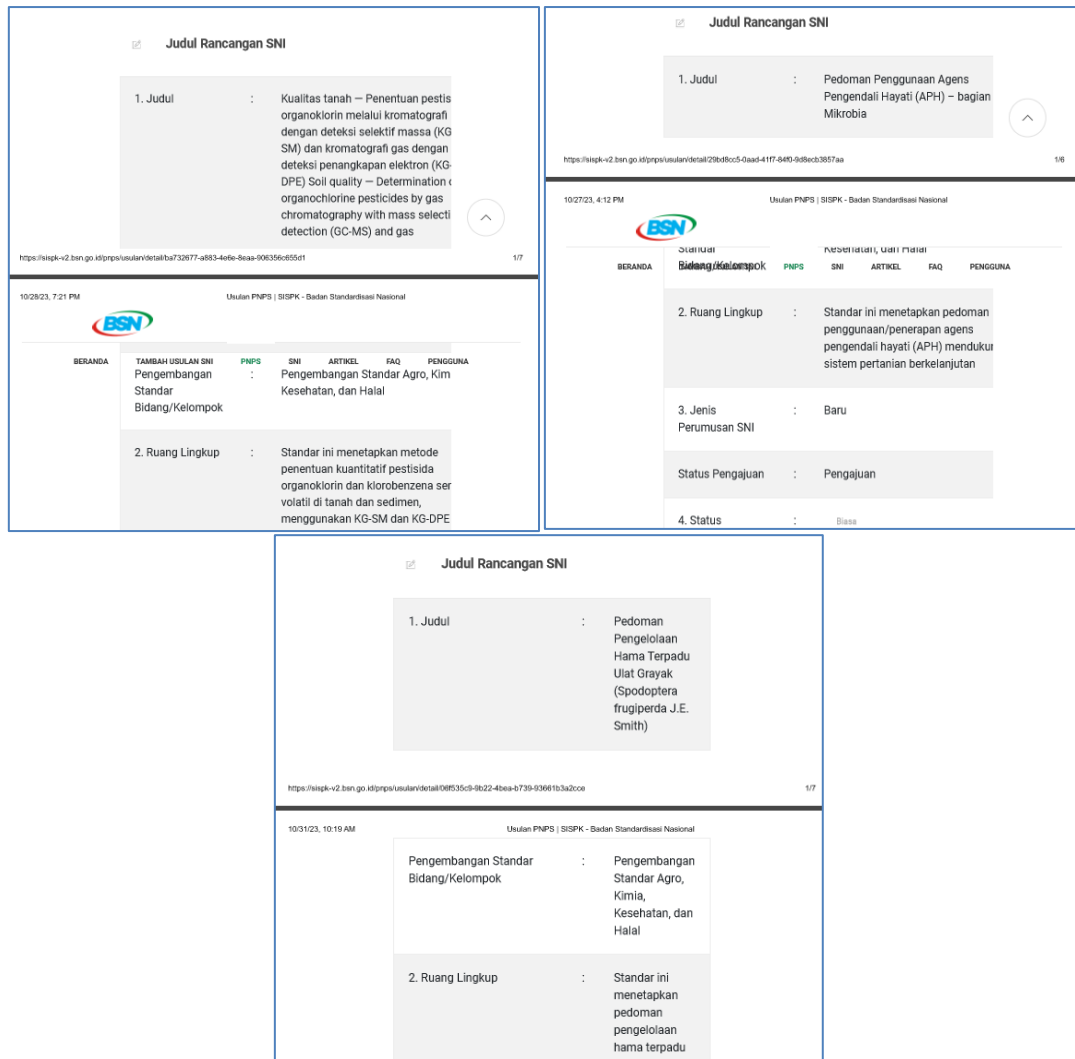


Gambar 5. SNI 9224-1:2023

Pada tahun 2023, BPSI Lingkungan Pertanian juga mengajukan 3 rancangan standar melalui program nasional perumusan standar (PNPS) ke Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada bulan Oktober 2023, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kualitas tanah — Penentuan pestis organoklorin melalui kromatogra dengan deteksi selektif massa (KG SM) dan kromatogra gas dengan deteksi penangkapan elektron (KGDPE) dengan ruang lingkup metode penentuan kuantitatif pestisida organoklorin dan klorobenzena sem volatil di tanah dan sedimen, menggunakan KG-SM dan KG-DPE.
- 2) Pedoman Penggunaan Agens Pengendali Hayati (APH) – bagian Mikrobial dengan ruang lingkup pedoman penggunaan/penerapan agens pengendali hayati (APH) mendukung sistem pertanian berkelanjutan.
- 3) Pedoman Pengelolaan Hama Terpadu Ulat Grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) dengan ruang lingkup pedoman pengelolaan hama terpadu untuk ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung.

Ketiga usulan PNPS telah disetujui oleh BSN untuk dirumuskan sebagai rancangan standar pada tahun 2024 melalui SK Kepala BSN Nomor 2/KEP/BSN/1/2024.



Gambar 6. Tangkapan layar rancangan standar lingkungan pertanian yang diajukan sebagai usulan PNPS TA. 2023

b. IKSK 2 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel,

dan pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan zona integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah. ZI adalah kondisi dimana pimpinan dan jajaran instansi pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di suatu unit kerja. Penilaian ZI mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Pembangunan ZI mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (governance) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Hubungan masing- masing komponen dan indikator pembangun komponen disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Hubungan komponen dan indikator pembangun komponen

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pada area pengungkit terdiri dari dua aspek, yaitu pemenuhan dan reform. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen

pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Pada tahun 2023, target IKSK 2 Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian adalah 81,00. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian tim asesor ZI lingkup BSIP, nilai pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian sebesar 83,10 yang terdiri dari komponen pengungkit sebesar 49,67 dan komponen hasil sebesar 33,43 (Tabel 7).

Tabel 7. Hasil penilaian pembangunan ZI Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian tahun 2023

Penilaian		Bobot	Nilai	%
A	PENGUNGKIT	60.00	49.67	82.78%
	I PEMENUHAN	30.00	23.37	77.90%
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00	3.32	83.00%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3.50	2.10	60.00%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	5.00	3.55	71.00%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00	3.61	72.20%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7.50	6.15	82.00%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00	4.64	92.80%
	II REFORM	30.00	26.30	92.80%
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00	2.00	50.00%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3.50	2.92	83.43%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	5.00	5.00	100.00%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00	4.51	90.20%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7.50	6.88	91.73%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00	5.00	100.00%
TOTAL PENGUNGKIT			49.67	
B	HASIL	40.00	33.43	
	I BIROKRASI YANG BERSIH DAN	22.50	18.13	80.58%
	a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17.50	13.13	75.03%
	b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00	5.00	100.00%
	II PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17.50	15.31	87.49%
	a Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik /	17.50	15.31	87.49%
TOTAL HASIL			33.43	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI			83.10	

Capaian IKSK 2 Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian sebesar 83,10 atau 102,59% dari target 81,00 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK 2 tahun 2023 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK 2 tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	81,00	83,10	102,59	Sangat berhasil

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, nilai minimal untuk dapat ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM dari Kementerian PANRB yaitu total nilai pengungkit dan hasil minimal 75,00 dengan minimal nilai pengungkit 40 untuk Menuju WBK dan minimal 85,00 dengan minimal nilai pengungkit 48 untuk Menuju WBBM.

c. IKSK 3 Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Capaian ini berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pada tahun 2023 telah diimplementasikan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga.

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mengukur empat variable yaitu (1) capaian output, (2) penyerapan anggaran, (3) efisiensi, (4) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Capaian output di tingkat satuan kerja diukur dengan membandingkan antara realisasi volume RO dengan target volume RO. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir. Efisiensi diukur dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

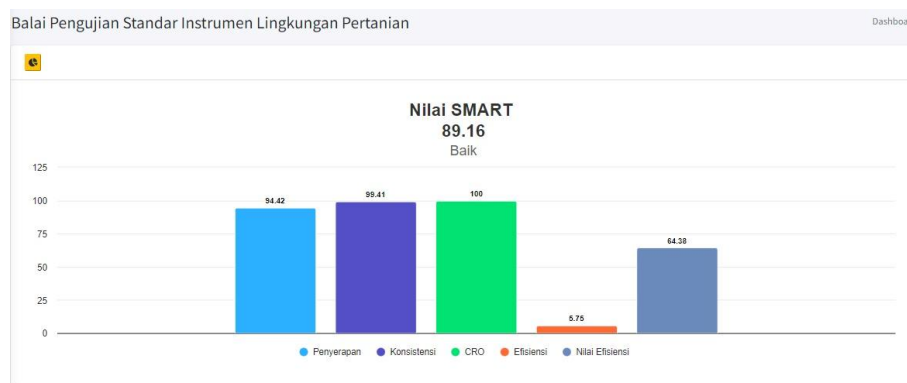
Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian Kinerja Anggaran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat unit eselon I atau satuan kerja. Bobot masing-masing variabel pada aspek implementasi yaitu (1) capaian output sebesar 43,5%, (2) efisiensi sebesar 18,41%, (3) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,09%, dan (4) penyerapan anggaran sebesar 9,16%. Nilai kinerja atas aspek implementasi tingkat satuan kerja diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NKI = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan:

- NKI : Nilai kinerja atas aspek implementasi
- P : Penyerapan anggaran
- K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- CRO : Capaian RO
- NE : Nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja
- W_P : Bobot penyerapan anggaran
- W_K : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- W_{CRO} : Bobot capaian RO
- W_E : Bobot efisiensi

Pada pelaksanaannya, nilai kinerja anggaran dihitung secara otomatis dengan menginput data Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) dan progres yang dilakukan per bulan ke dalam aplikasi SMART dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian tahun 2023 berdasarkan aplikasi SMART (Gambar 17) sebesar 89.16 yang terdiri dari variabel penyerapan sebesar 94.42, konsistensi sebesar 99,41, CRO sebesar 100, efisiensi sebesar 5,75, dan nilai efisiensi sebesar 64,38.



Gambar 8. Nilai SMART Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian TA 2023
 Sumber: <https://monev.kemenkeu.go.id> (15 Januari 2024)

Capaian IKSK 3 Nilai kinerja anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian yang diperoleh tercapai 89,16% dari target sebesar 87,00 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK 3 tahun 2023 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK3 TA 2023

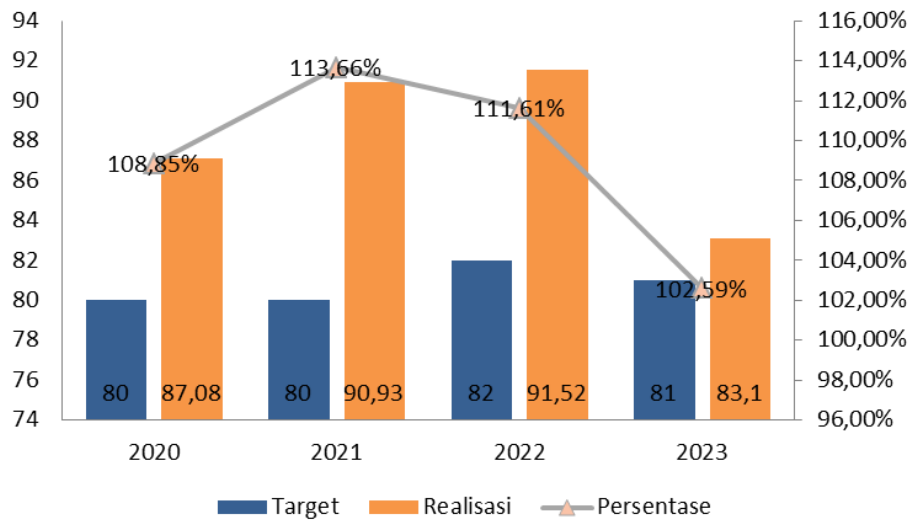
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	87,00	89,16	102,48	Sangat Berhasil

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian tahun 2023 merupakan kinerja tahun pertama sebagai lembaga baru pasca transformasi kelembagaan dari Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menjadi Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian disusun sesuai dengan tuisi pada Permentan Nomor 13 Tahun 2023 yang mengatur SOTK UPT (Balai) lingkup BSIP.

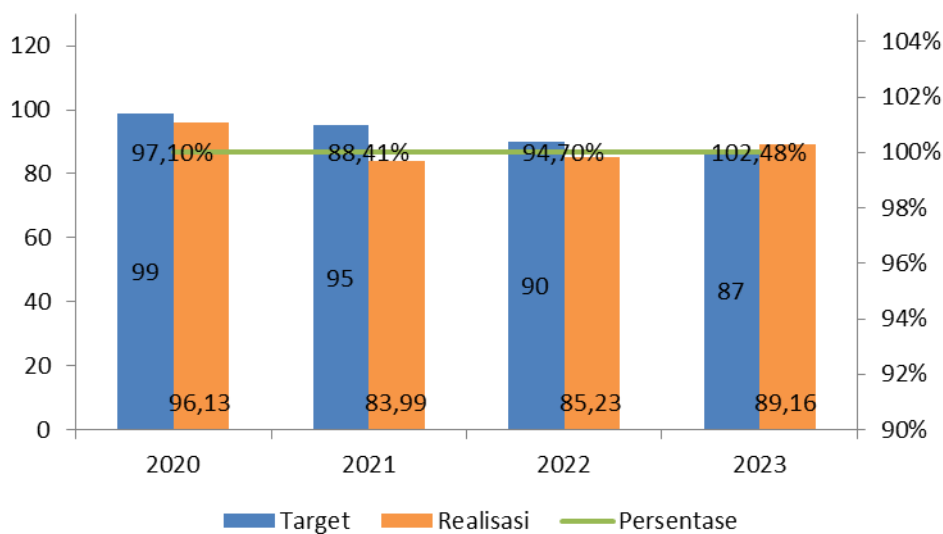
Indikator kinerja pada program/kegiatan teknis Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian berupa 1) Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan yang dilaksanakan tahun berjalan (%), sehingga capaian kinerja pada program/kegiatan teknis tidak dapat dibandingkan antara tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Indikator kinerja pada program/kegiatan dukungan manajemen masih sama sejak tahun 2020 yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dan Nilai Kinerja Anggaran. Perbandingan antara capaian kinerja Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan Nilai Kinerja Anggaran sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 disajikan pada gambar 9 dan gambar 10.



Gambar 9. Perbandingan capaian kinerja Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM 2020-2023

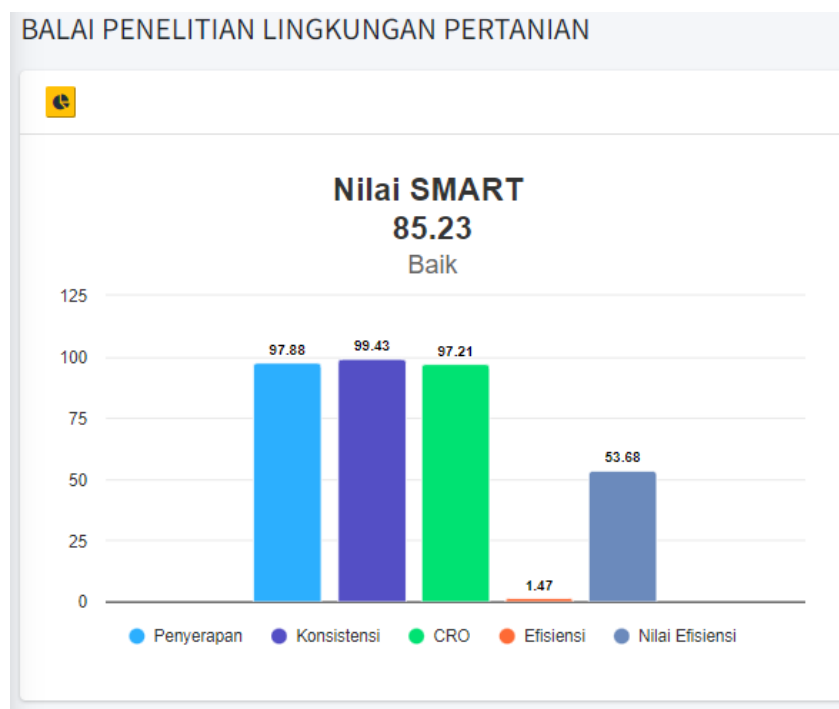
Jika dibandingkan dengan tahun 2022, Nilai Pembangunan ZI mengalami penurunan sebesar 9,02% yaitu dari 91,52 di tahun 2022 menjadi 83,10 di tahun 2023. Nilai Pembangunan ZI sebesar 87,08 pada tahun 2020 mengalami kenaikan 2,49% menjadi 90,93 di tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 menjadi 91,52 atau mengalami penurunan sebesar 2,05%. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Pembangunan ZI cenderung fluktuatif selama kurun waktu empat tahun terakhir, namun selalu dapat melampaui target minimum pengusulan nilai WBK/WBBM nasional. Diperlukan upaya yang konsisten untuk mempertahankan dan meningkatkan Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian.



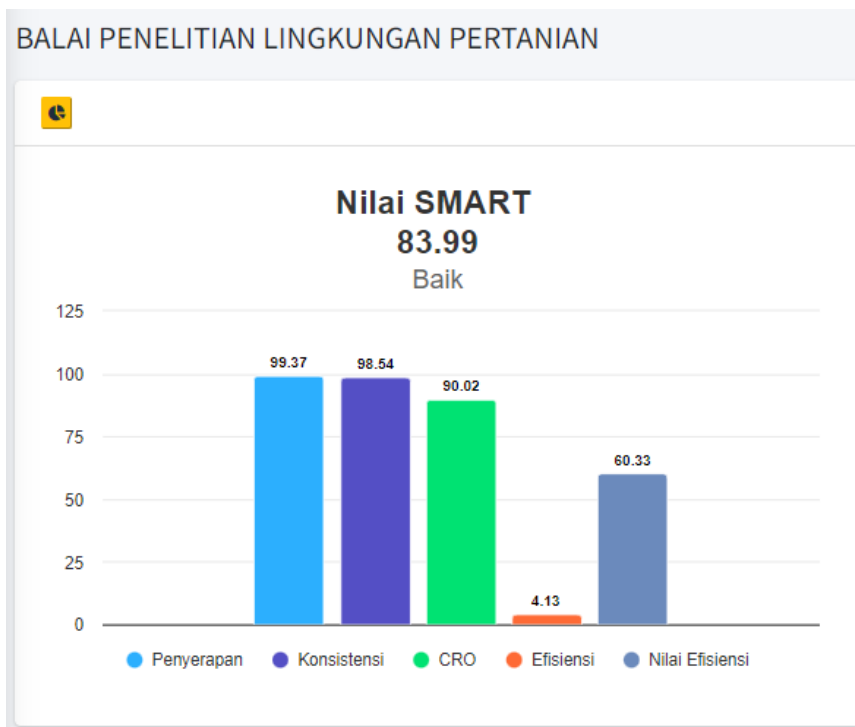
Gambar 10. Perbandingan capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran 2020-2023

Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2023 sebesar 89,16 mengalami kenaikan 7,78% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 85,23. Kenaikan ini disebabkan perbedaan efisiensi yang signifikan antara tahun 2022 dan 2023 sebagaimana ditampilkan pada Gambar 17 dan Gambar 20. Pada tahun 2022, efisiensi mencapai 1,47, sedangkan pada tahun 2023 efisiensi hanya sebesar 5,75. Efisiensi dipengaruhi oleh proporsi realisasi volume RO yang melebihi target, dimana pada tahun 2023 proporsi realisasi volume RO dengan indikator kinerja ZI Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2022 dengan indikator kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian.

Nilai Kinerja Anggaran sebesar 96,13 pada tahun 2020 mengalami penurunan 8,69% menjadi 83,99 di tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan 6,29% menjadi 85,23. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Kinerja Anggaran cenderung fluktuatif selama kurun waktu empat tahun terakhir, meskipun pada tahun 2023 hanya dapat mencapai 102,48% dari target, namun masih dapat dikategorikan berhasil. Diperlukan perencanaan yang matang dalam penentuan target Nilai Kinerja Anggaran di tahun berikutnya mempertimbangkan tuis Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian sebagai lembaga baru di bidang standardisasi instrumen.



Gambar 11. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022



Gambar 12. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021

3.1.3. Capaian Kinerja Lainnya

Asesmen Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015

ISO 17025:2017 adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas produk serta layanan laboratorium. Penerapan sertifikasi ISO 17025:2017 mampu memberikan manfaat serta keuntungan pada laboratorium, organisasi, sekaligus pelanggan. Sertifikat ISO 17025:2017 laboratorium pengujian BPSI Lingkungan Pertanian telah diterbitkan pada bulan November 2023. Hal ini menunjukkan bahwa laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian telah menerapkan sistem mutu secara teknis kompeten dan dapat memberikan hasil pengujian yang valid sesuai dengan standar kompetensi laboratorium pengujian.

Capaian BPSI Lingkungan Pertanian lainnya di akhir Desember 2023 adalah terbitnya Sertifikat ISO 9001:2015 untuk manajemen mutu BPSI Lingkungan Pertanian. Terbitnya sertifikat ini membuktikan bahwa BPSI Lingkungan Pertanian berkomitmen untuk menerapkan standar sesuai Persyaratan Mutu ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup pengujian standar instrumen lingkungan pertanian yang meliputi emisi gas rumah kaca, cemaran residu, cemaran logam berat, serta penyebarluasan dan penerapannya.

PENUTUP

Laporan kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat informasi tentang organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis capaian kinerja.

Capaian kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian tahun 2023 merupakan pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sekaligus pelaksanaan tahun pertama Renstra PSI Perkebunan periode 2023-2024 sebagai lembaga baru dengan tugas dan fungsi sesuai Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Pada tahun 2023, Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian telah berhasil melaksanakan dua sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam tiga IKSK. Capaian IKSK1 Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan pada tahun 2023 adalah 1 (satu) RSNI dari target 1 (satu) RSNI atau tercapai 100% sehingga masuk ke dalam kategori **berhasil**. Capaian IKSK2 Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian sebesar 83,10 atau 102,6% dari target 80,00 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan **sangat berhasil**. Capaian IKSK3 Nilai kinerja anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian yaitu 89,19 atau tercapai 103% dari target sebesar 87 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan **sangat berhasil**.

Dengan demikian, kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian tahun 2023 telah berhasil dicapai dengan rata-rata persentase ketercapaian sebesar 101,69% menunjukkan keberhasilan dengan kategori **sangat berhasil**. Capaian kinerja lainnya sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi juga telah dihasilkan Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian yaitu 1) Pemeliharaan sistem mutu akreditasi laboratorium pengujian sesuai ISO/IEC 17025:2017 Laboratorium Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian; 2) Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian, dan 3) Penghargaan dari KPPN terkait instansi yang sudah menerapkan transaksi menggunakan aplikasi digipay dan kartu kredit pemerintah (KKP).

Keseluruhan capaian kinerja yang telah dihasilkannya Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian tahun 2023 menjadi bagian evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi bahan acuan dalam perencanaan di tahun berikutnya. Upaya peningkatan kinerja harus terus dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Penetapan skala prioritas kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengacu pada prioritas nasional dan kebutuhan stakeholder
3. Peningkatan kualitas SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi organisasi.
5. Penciptaan inovasi sistem pemerintahan berbasis elektronik/IT untuk mendukung pelaksanaan kinerja yang lebih efektif dan efisien

